



Pemkot Beri Keringanan Pajak Hotel

● PHRI Sebut Butuh Pinjaman Modal

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan keringanan pajak hotel di tengah pandemi Covid-19. Pembayaran pajak nantinya bisa dilakukan pada saat situasi sudah berangsur normal.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Perwadi, mengatakan, Pemkot Yogyakarta juga telah memberikan keringanan pada pajak air tanah, PDAM, saluran air limbah, dan lain-lain. "Kami berikan keringanan pada pajak hotel, pembayaran nanti saat sudah normal, kami turunkan. Pajak air tanah, PDAM, saluran air limbah kami beri diskon," katanya, Jumat (29/5).

Ia melanjutkan saat ini Pemkot Yogyakarta masih fokus dalam membahas protokol baru setelah hotel-hotel mulai beroperasi. Menurut dia, hotel harus memiliki protokol khusus agar menjamin keamanan pengunjung.

"Misal hotel buka, harus punya protokol yang baku,

protokol yang ada akan kami tambah yang muatannya lokal. Kami wacanakan tetap ada surat sehat dari sokter, sehingga mereka nanti mendapatkan kenyamanan juga," lanjutnya.

"Saat ini memang hotel-hotel sudah menerapkan, seperti *thermo gun*, tempat cuci tangan, dan lain-lain. Sekarang ini kan yang jadi perhatian adalah siapa yang boleh masuk (hotel), terutama identitas kesehatannya," sambungnya.

Selama perpanjangan masa tanggap darurat Covid-19, ia memastikan pembahasan protokol baru selesai dibahas.

Pinjaman modal

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo, mengakui hotel sudah mendapat keringanan dari Pemda DIY dan Pemkot, namun saat ini hotel-hotel dan restoran membutuhkan pinjaman modal. Menurut dia baik hotel dan restoran mem-

butuhkan dana tambahan untuk menyiapkan infrastruktur.

"Saat ini yang kami butuhkan adalah pinjaman modal dari pemerintah. Untuk menyiapkan infrastruktur juga butuh modal. Setelah buka, kami tidak bisa menjamin hotel dan restoran langsung ramai. *Cash flow* hotel dan restoran *megap-megap*, jadinya butuh modal," terangnya.

"Selain itu kami juga butuh suntikan keringanan dari PLN. Kalau dari pemerintah (provinsi/kota) sudah, kalau PLN kan kaitannya dengan pemerintah pusat," sambungnya.

Pihaknya pun melarang hotel dan restoran untuk kembali beroperasi, jika tidak menyiapkan infrastruktur. Ada 22 hotel dan restoran yang masih buka. "Nanti akan ada 25 hotel dan restoran lagi yang buka. Kami sudah pastikan sesuai dengan standar, intinya PHBS. Tidak hanya untuk pengunjung saja, tetapi juga pegawainya," tambahnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005